

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan otonomi daerah berlaku secara efektif sejak awal Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional mengatur dan membangun daerahnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap daerah memiliki kewenangan yang lebih luas di berbagai bidang kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten/Kota di samping memiliki kewenangan yang lebih luas juga memikul tanggungjawab yang lebih besar. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu mandiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah.

Kebijakan pemberian dan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan serasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan langkah strategis untuk membuka peluang dan kesempatan kepada daerah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Menurut Mardiasmo (2002:46) tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk

meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*public*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan berdasarkan misi di atas adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini sangat memerlukan peran dari pemerintah daerah sehingga seiring dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah maka aktivitas perekonomian daerah akan meningkat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dampak peran tersebut diharapkan mampu sebagai pemacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang dapat memberikan *multiflier effect* atau efek pengganda terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan perannya di era otonomi daerah dengan membentuk Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah yang dikenal dengan PD BKK. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah di bentuk di tiap-tiap kecamatan yang tersebar di seluruh propinsi Jawa Tengah termasuk di Kota Surakarta yang menjadi obyek penelitian ini. Pembentukan PD BKK tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah tersebut di atas menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah tersebut dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Setiap perusahaan daerah perlu menyelaraskan perkembangan ekonomi di daerah agar maksud dan tujuan dapat dicapai dengan segala kendala-kendala yang mungkin terjadi.

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang terdapat di Kota Surakarta merupakan salah satu perusahaan di daerah yang dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, antara lain: meningkatkan perannya dalam mendorong perekonomian daerah, meningkatkan mutu pelayanan dan produk-produk yang ditawarkan dan memperbaiki manajemen yang belum optimal. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai lembaga kredit mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga diharapkan seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat digali dan dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk mampu membiayai kegiatan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu kebijakan yang dapat

ditempuh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD yaitu dengan optimalisasi peran Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang terdapat di Kota Surakarta. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tersebar di lima kecamatan yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Jebres dan Banjarsari. Adapun sebagai obyek dari penelitian ini adalah Badan Kredit Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Pelaksanaan otonomi daerah akan berpengaruh terhadap perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Perusahaan daerah diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi justru sebaliknya sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat membiayai pembangunan daerah. Dalam kondisi yang demikian maka kinerja keuangan perusahaan daerah harus menjadi perhatian agar mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Seiring dengan hal tersebut maka perusahaan daerah yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan harus didorong pertumbuhannya. Agar dapat berperan dalam mendorong ekonomi daerah maka perkembangan perusahaan daerah perlu ditonjolkan dimana peran tersebut akan berpengaruh positif dengan didukung kinerja keuangan yang baik.

Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan bagian laba perusahaan daerah untuk mewujudkan perannya sebagai intermediasi dana bagi pembangunan ekonomi Daerah. Peningkatan laba dan peranan tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemilik modal. Harapannya adalah bahwa kinerja keuangan PD BKK Kecamatan Jebres Kota Surakarta akan mampu menunjukkan kinerja yang selalu meningkat. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis akan membahas kinerja Perusahaan Daerah

Badan Kredit Kecamatan Jebres dengan judul penelitian "**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BKK) JEBRES KOTA SURAKARTA**".

B. Perumusan Masalah

Permasalahan pokok yang ingin diketahui lebih mendalam pada penelitian ini dilakukan dengan perumusan masalah yaitu "apakah kinerja keuangan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah sehat?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan PD BKK Jebres Kota Surakarta dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah menurut Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Faktor-faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kota selaku salah satu pemilik modal, mengenai kinerja keuangan

Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan daerah untuk berperan aktif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;

2. Sebagai masukan dan dorongan kepada manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerja keuangan dan pangsa pasar sehingga dapat memberikan bagian laba yang terus meningkat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai penggerak perekonomian daerah;
3. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kinerja perusahaan daerah di bidang keuangan dan ekonomi untuk penelitian lebih lanjut.